

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara salah satunya dilihat dari perekonomian negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah memasuki perekonomian yang cukup meningkat dan mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan peran masyarakat di bidang ekonomi yang menunjang peningkatan perekonomian bangsa terutama para pengusaha baik pengusaha besar, kecil, maupun yang menengah. Akan tetapi dalam sektor usaha tidak akan terlepas dari suatu masalah untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut, seperti permasalahan dimodal usaha, pemasaran, manajemen, kredit, serta pencapaian keuntungan yang tidak sesuai dengan target.

Pada umumnya, setiap perusahaan mempunyai beberapa kegiatan usaha seperti kegiatan operasional yang biasanya dilakukan kegiatan penjualan barang atau jasa baik yang dilakukan secara transaksi tunai maupun secara kredit. Apabila transaksi dilakukan secara kredit maka suatu perusahaan mempunyai piutang atau tagihan yang harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan sendiri bagi perusahaan. Namun biasanya, dalam penagihan piutang yang dilakukan oleh suatu perusahaan sering mengalami kemacetan sehingga untuk mengatasi masalah-masalah tersebut terdapat lembaga keuangan, lembaga

keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan bukan bank.

Lembaga keuangan yang berbentuk bank dalam hal kegiatan penyaluran dana bertujuan untuk modal kerja, investasi, konsumsi, sedangkan lembaga keuangan bukan bank dalam hal kegiatan penyaluran dana hanya bertujuan untuk investasi, namun bukan berarti lembaga keuangan yang berbentuk bukan bank tidak bisa menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi.¹ Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat baik konvensional maupun syariah, sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perdagangan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal dan lain-lain.

Anjak piutang salah satu dari bentuk usaha kegiatan lembaga pembiayaan Indonesia, menurut Dahlan Siamat, definisi anjak piutang adalah sebagai transaksi pembelian dan/atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan factoring, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran klien oleh perusahaan factoring.² Sedangkan perusahaan anjak piutang (factoring company) menurut Pasal 1 angka 8 Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Pasal 1 huruf I Kepmenkeu No. 1251 Tahun 1988 adalah:

¹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 6.

² Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 73.

“ Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri ”.

Melalui jasa anjak piutang juga, dunia usaha dimungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan baru dalam bentuk *instant cash* (sampai dengan 80% dari nilai invoice) dikaitkan dengan jumlah penjualan kredit yang dilakukannya dan perusahaan anjak piutang juga diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan dalam *credit management*.³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan anjak piutang dapat mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan kredit yang merupakan kegiatan suatu perusahaan. Hal yang tidak kalah penting tentang manfaat pembiayaan anjak piutang bagi industri kecil dan menengah yang mempunyai produk untuk diekspor, adalah fasilitas anjak piutang yang diterima dapat dijadikan pengganti *Letter of Credit*, hal ini dimungkinkan terdapat kegiatan Internasional Factoring dalam perusahaan anjak piutang.⁴

Namun, perkembangan anjak piutang tidak seapik yang diharapkan, hal ini terjadi karena banyak para pelaku usaha yang kurang mengenal lembaga pembiayaan khususnya anjak piutang. Perkembangan pengaturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan juga tidak sepesat pengaturan tentang lembaga keuangan bank. Sehingga eksistensi keberadaan dari lembaga pembiayaan anjak piutang itu sendiri sangat

³ Budi Rachmat, 2003, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 97.

⁴ Budi Rachmat, 2002, *Multi Finance Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 77.

menurun yang akhirnya berdampak perusahaan anjak piutang tidak dapat berkembang dengan baik seperti lembaga-lembaga pembiayaan yang lain atau lembaga keuangan bank, padahal perusahaan anjak piutang bisa dijadikan alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan dana yang mendesak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai “PERKEMBANGAN HUKUM PENGATURAN ANJAK PIUTANG SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA (Studi Kasus Perusahaan MultiFinance Wilayah Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan hukum pengaturan anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang dapat menghambat perkembangan anjak piutang apabila dilihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan hukum pengaturan anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat perkembangan anjak piutang apabila dilihat dari Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).

D. Manfaat Penelitian

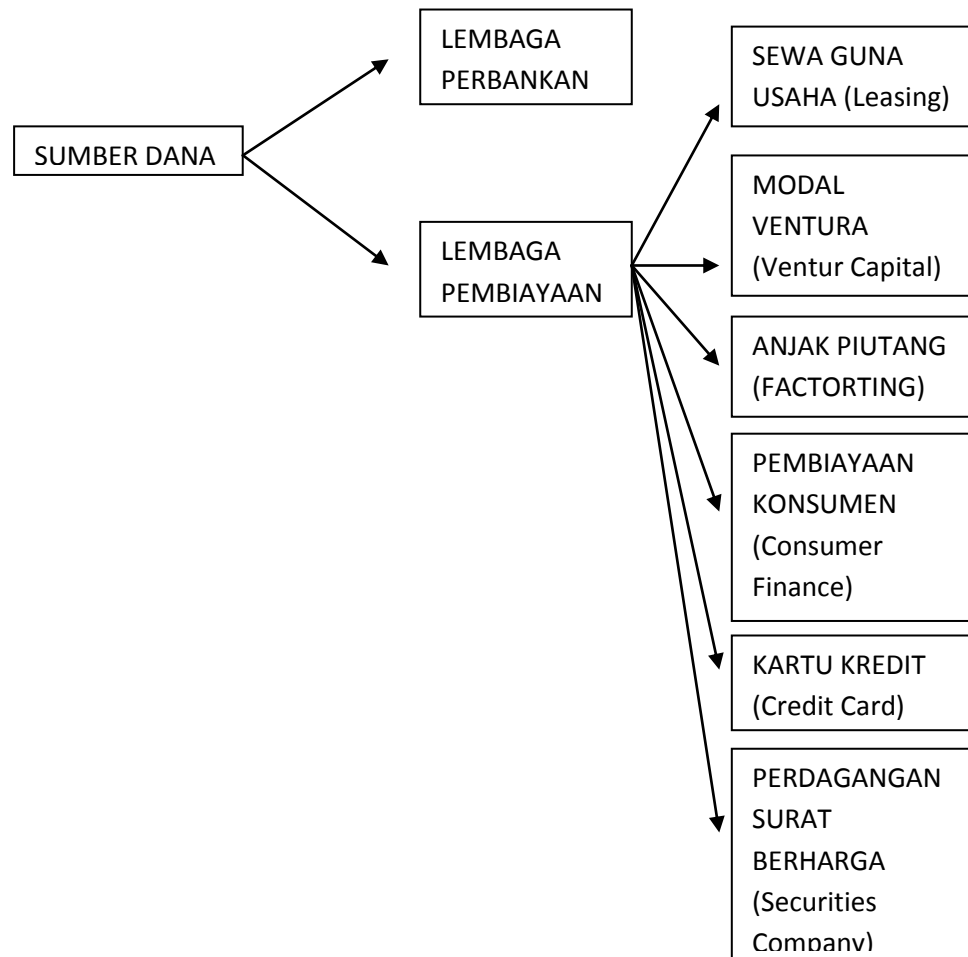
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah kontribusi pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai perkembangan hukum pengaturan anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, pembentukan pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai perkembangan hukum pengaturan anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran



Anjak piutang merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berperan dalam kegiatan usaha. Objek pembiayaan anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Para pihak dalam kegiatan anjak piutang sendiri yakni factor, client, dan customer. Factor adalah perusahaan anjak piutang yang memberikan pembiayaan, client adalah perusahaan yang mendapat pembiayaan atau fasilitas dari perusahaan

anjak piutang, dan customer adalah perusahaan atau pihak ketiga yang mempunyai utang atau kredit dari client.

Anjak piutang dilihat dari segi penanggungan resiko dapat dibedakan menjadi dua yakni recourse factoring dan without recourse factoring. Recourse factoring adalah anjak piutang dimana factor tidak menanggung resiko atau gagalnya pembayaran dari customer maksudnya apabila customer gagal membayar, pailit, atau bangkrut maka factor tidak menanggung resiko tersebut melainkan client yang menanggungnya atau biasa dikenal dengan jaminan, sedangkan without recourse factoring adalah anjak piutang yang meletakkan bagian tagihan beserta seluruh miliknya sepenuhnya pada pihak perusahaan factor atau biasa dikenal dengan tanpa jaminan.⁵ Dalam anjak piutang without recourse, factor memberlakukan piutang yang telah dialihkan dari client sebagai pembelian piutang. Factor otomatis memiliki hak sekaligus menanggung resiko kolektibilitas piutang yang diterimanya, maksudnya factor menanggung segala resiko apabila customer gagal bayar, pailit atau bangkrut. Disisi lain, untuk menutupi resiko kolektibilitas piutang, maka factor akan membentuk cadangan piutang yang tidak tertagih.⁶

Suatu perusahaan biasanya memilih lembaga pembiayaan khususnya anjak piutang biasanya untuk kebutuhan dana yang mendadak.

Anjak piutang juga dapat dipandang sebagai suatu alternatif pendanaan

⁵ Indra Kusuma Hadi, "Mekanisme Pengalihan Piutang Dalam Perjanjian Factoring Loan Divergence Mechanism In Factoring Agreement", *Katun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66 Tahun XVII (Agustus, 2015), hlm. 334.

⁶ Teddy Oswari dan Sri Wahyuni Bastias, 2007, *Anjak Piutang Sebagai Alternatif Permodalan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dengan Penetapan Dua Metode Biaya Bunga*, Jurnal Akutansi dan Investasi, Vol. 2 No.2, hlm. 4.

yang mempercepat cash flow perusahaan dan mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh customer yang terlambat atau mengalami kemacetan kredit.

Seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu, anjak piutang mempunyai peran tersendiri dalam dunia usaha. Perusahaan anjak piutang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan terutama dalam kemampuan *credit management* dan kemampuan menangani kredit macet dimana hal tersebut dapat mengganggu pengelolaan modal suatu perusahaan tersebut. Namun, dengan keunggulan perusahaan anjak piutang terdapat resiko bagi perusahaan anjak piutang itu sendiri. Resiko-resiko bagi perusahaan anjak piutang itu sendiri antara lain belum adanya perlindungan hukum bagi perusahaan anjak piutang yang cukup memadai yang berupa suatu peraturan atau undang-undang khusus kegiatan perusahaan anjak piutang, perlindungan akan diperlukan apabila pada saat tagihan jatuh tempo customer tidak bisa membayar atau membayar dengan jangka waktu yang lama. Resiko tersebut akan terlihat apabila transaksi anjak piutang dengan *without recourse*. Selain itu dengan tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang anjak piutang akan semakin menghambat perkembangan anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan dan juga kurangnya sosialisasi tentang lembaga pembiayaan anjak piutang sehingga banyak perusahaan-perusahaan lebih memilih mengajukan kredit ke lembaga keuangan bank.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁸ Oleh karena itu, penulis bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu perkembangan hukum pengaturan anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan bagi pelaku usaha dan faktor yang menghambat perkembangan dari anjak piutang apabila dilihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perusahaan Pembiayaan.

3. Bentuk dan Jenis Data

a. Data Primer

⁷ Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

⁸ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineck Cipta, hlm. 23

Data yang diperoleh langsung oleh penulis dari salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan sewa guna ijin usaha di wilayah Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.⁹

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain: Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Kepmenkeu Nomor 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Perpres Nomor 9 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum lembaga pembiayaan dan anjak piutang.

⁹ Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta, Hal. 8.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui cara yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara, yang akan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pada tahap awal, akan dilakukan studi kepustakaan dengan cara mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahannya.

Tahap selanjutnya, akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap informan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif yaitu menekankan pada makna, penalaran, definisi, suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁰ data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan, kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh dari salah satu perusahaan multifinance di wilayah Surakarta sehingga dapat disusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulannya.

¹⁰ Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 257.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penyusunan penelitian digunakan untuk memudahkan dalam pembahasan, adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan
- B. Tinjauan Umum Anjak Piutang

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

- A. Perkembangan Hukum Pengaturan Anjak Piutang Sebagai
Lembaga Pembiayaan Di Indonesia
- B. Faktor Penghambat Perkembangan Anjak Piutang Dilihat Dari
Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA